



Kemenkum Kalsel News

E-Buletin Edisi Pekan Keempat Oktober



**Kemenkum Kalsel
Dorong Desa Sadar
Hukum**



**Percepat Merek Kolektif
Koperasi Merah Putih**



**Kanwil Kemenkum Kalsel
Ikuti Reviu Kepatuhan
LHKASN 2024**



Kunjungi laman kami



kalsel.kemenkum.go.id

Terhubung lebih dekat:



kemenkumkalsel

20 Oktober 2025

Satu Tahun Kinerja Moncer Kementerian Hukum: Pilar Kuat Mendukung Visi Prabowo Gibran



Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mencatatkan sejumlah capaian kinerja dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat, selama satu tahun pada periode 1 Oktober 2024 - 1 Oktober 2025. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menyebutkan bahwa kinerja Kemenkum mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Di bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Kemenkum telah menyelesaikan 17.773.269 permohonan dari total 17.829.793 permohonan yang masuk, atau sebanyak 99,68%. Capaian tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode Oktober 2023 - Oktober 2024 yang berada pada angka 14.177.385 untuk permohonan layanan yang masuk, dan telah diselesaikan sebanyak 14.124.695.

Dari keseluruhan layanan AHU, pada periode ini Kemenkum telah mendapatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp1.212.169.274.859,- atau naik 4,85% dibandingkan periode sebelumnya yang berjumlah Rp1.156.097.445.512,-.

“Kenaikan jumlah permohonan yang masuk, diselesaikan, hingga PNBP di bidang AHU mengalami kenaikan karena di tahun ini Kemenkum telah mendigitalisasi layanan-layanan AHU. Sehingga lebih cepat dan lebih mudah diakses,” ucap Supratman di kantor Kemenkum, Senin (20/10/2025).

Selanjutnya, di bidang Kekayaan Intelektual (KI), Kemenkum telah menerima 387.140 permohonan. Jumlah ini naik 16,40% dari periode sebelumnya yang berjumlah 332.594. Dari permohonan yang masuk, pada periode ini Kemenkum telah menyelesaikan sebanyak 409.819 permohonan, termasuk tunggakan yang belum diselesaikan pada periode sebelumnya.

Dari segi PNBP, periode satu tahun ini layanan KI telah menyumbang PNBP sebesar Rp958.530.465.167,-. PNBP tersebut naik 5,18% dari periode lalu yang bernilai Rp911.363.891.569,-.

“Tidak hanya layanan AHU yang telah berbasis digital. Layanan KI pun telah mengalami transformasi digital, di antaranya merek, paten, hak cipta, hingga indikasi geografis,” ungkapnya.

Kemudian, di bidang Peraturan Perundang-undangan, Kemenkum telah menyelesaikan 11.191 proses harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dari total 11.392 permohonan harmonisasi yang masuk. Jumlah harmonisasi juga mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berhasil menyelesaikan 9.973 harmonisasi dari 10.000 permohonan yang diterima.

“Tahun ini Kemenkum meluncurkan aplikasi e-Harmonisasi. Kementerian, lembaga, dan pmda lebih mudah mengajukan, meninjau, serta melakukan penyesuaian terhadap rancangan peraturan secara lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, masyarakat dapat memberi masukan atas rancangan regulasi,” kata Supratman.

Berikutnya, bidang pembinaan hukum nasional, Kemenkum telah memberikan 6.507 bantuan hukum litigasi dan 2.372 bantuan hukum non litigasi. Supratman menjelaskan bahwa pemberian bantuan hukum ini didukung dengan adanya Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan. Tahun ini, Kemenkum menargetkan pendirian 7.000 Posbankum. Hingga Oktober 2025, jumlah Posbankum telah melebihi target yaitu di angka 40.714.

“Posbankum akan memberikan empat layanan, yaitu layanan informasi dan konsultasi hukum; layanan bantuan hukum dan advokasi; layanan mediasi; dan layanan rujukan advokat. Posbankum juga didukung oleh para penyuluh hukum, mahasiswa magang, kepala desa, lurah, serta babinsa dan babinkamtibmas,” ungkap Menteri lulusan doktor hukum ini.

Dalam bidang strategi kebijakan, Kemenkum telah melakukan analisis kebijakan terhadap 65 isu aktual. Kemenkum juga melakukan kajian untuk mendukung 28 Program Penyusunan, yaitu instrumen perencanaan yang digunakan untuk menyusun Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) secara terencana, terpadu, dan sistematis. Selain itu, Kemenkum juga memiliki layanan jurnal hukum yang dapat diakses secara gratis.

Ada pula layanan Kemenkum di bidang pengembangan SDM. Kemenkum menyelenggarakan berbagai jenis pelatihan, baik untuk internal maupun eksternal Kemenkum. Pada satu tahun ini, tercatat sebanyak 50.231 peserta telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan dalam berbagai metode, di antaranya webinar, klasikal, MOOC, Community of Practice (CoP), pembelajaran jarak jauh, maupun secara hybrid.

Di bidang kesekretariatan, Kemenkum terus berupaya melakukan reformasi birokrasi agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik, menghindarkan penyelewengan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Level reformasi birokrasi Kemenkum berada pada angka 90,38. Di samping itu, Kemenkum juga mendukung penggunaan produk dalam negeri pada posisi 72,88%.

Capaian terakhir, kata Supratman, adalah capaian Inspektorat Jenderal. Ia menyatakan kalau Kemenkum telah menindaklanjuti 513 temuan dan 1.092 rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Supratman menyatakan bahwa Kemenkum terus berupaya memberikan layanan yang terbaik, transparan, dan akuntabel agar masyarakat memperoleh kepastian hukum. Transformasi digital menjadi langkah strategis Kemenkum dalam rangka reformasi birokrasi pelayanan publik. Supratman menargetkan semua pelayanan Kemenkum telah berbasis digital di tahun 2026.

“Transformasi digital menjadi komitmen kami agar masyarakat mendapatkan kepastian dari setiap pelayanan di Kementerian Hukum. Kepastian waktu, kepastian biaya, kepastian informasi, hingga kepastian akses bagi semua masyarakat,” tutup Supratman.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan bahwa capaian kinerja Kementerian Hukum merupakan perlu sinergi kuat antara pusat dan daerah. Ia menegaskan komitmen Kantor Wilayah untuk terus mendukung penguatan layanan hukum yang cepat, transparan, dan berkeadilan guna mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran, menjadikan hukum sebagai pilar pembangunan nasional.



20 Oktober 2025

Kemenkum Kalsel Gelar Apel Pagi: Dorong Semangat dan Integritas Menuju WBK



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan kembali melaksanakan kegiatan rutin Apel Pagi pada Senin (20/10) di halaman kantor. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran pegawai, baik pejabat struktural, fungsional, maupun CPNS dan PPNPN.

Bertindak sebagai pembina apel, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Dewi Woro Lestari, dengan dihadiri Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-perundang dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana.

Dalam amanatnya, Dewi Woro Lestari menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai atas kedisiplinan dalam mengikuti apel pagi yang merupakan bentuk tanggung jawab dan disiplin terhadap pelaksanaan tugas.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran atas kedisiplinan dan semangat dalam mengikuti apel pagi. Semoga hasil dari proses kita dalam pembangunan Zona Integritas tahun ini dapat membuahkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK),” ujarnya.

Lebih lanjut, ia berpesan agar seluruh kegiatan dan program kerja dilaksanakan dengan sepenuh hati.

“Setiap kegiatan yang kita jalankan harus dilakukan dengan penuh komitmen dan ketulusan, agar hasilnya maksimal dan memberikan dampak nyata bagi organisasi,” tambahnya.

Apel berlangsung dengan tertib dan khidmat sebagai bentuk implementasi nilai-nilai BerAKHLAK di lingkungan Kementerian Hukum.



20 Oktober 2025

Kemenkum Kalsel Gelar Coffee Morning di Taman WBK, Bahas Rencana Kegiatan dan Penguatan Posbankum



Banjarmasin, Humas_Info – Pada Senin, 20 Oktober 2025, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, memimpin kegiatan coffee morning bersama jajaran Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Manajerial, serta Pejabat Non-Manajerial di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel, yang kali ini digelar di Taman WBK.

Kegiatan rutin yang berlangsung dalam suasana santai dan terbuka ini menjadi sarana konsolidasi internal untuk membahas berbagai agenda penting, mulai dari rencana kegiatan, arah kebijakan pelayanan hukum, hingga penguatan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di wilayah Kalimantan Selatan.

Dalam suasana penuh keakraban, para pejabat dan pegawai terlibat aktif dalam diskusi mengenai strategi peningkatan efektivitas pelaksanaan program lintas divisi. Pembahasan juga menyoroti perencanaan kegiatan hukum, pembinaan regulasi daerah, pelayanan kekayaan intelektual, serta proses pembangunan gedung Kantor Wilayah.

Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem, dalam arahannya menegaskan bahwa kegiatan coffee morning bukan sekadar ajang santai, tetapi forum penting untuk memperkuat koordinasi, menyatukan langkah, dan menjaga semangat kebersamaan.

“Coffee morning di Taman WBK ini kita manfaatkan sebagai ruang refleksi dan komunikasi terbuka. Kita bahas bersama rencana kegiatan, kebijakan, hingga penguatan Posbankum, agar pelayanan hukum kepada masyarakat semakin berkualitas dan berdampak nyata,” ujarnya.

Alex juga mengingatkan pentingnya memperkuat sinergi lintas bidang dan mempertahankan semangat kerja kolaboratif dalam setiap pelaksanaan program. Menurutnya, keberhasilan Kanwil Kemenkum Kalsel tidak hanya diukur dari capaian kinerja administratif, tetapi juga dari manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat melalui layanan hukum yang profesional dan berkeadilan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta komunikasi yang solid, koordinasi yang efektif, dan semangat kerja yang berkesinambungan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan hukum yang humanis di Kalimantan Selatan.

20 Oktober 2025

Pelantikan Anggota MPD Notaris Kab. Banjar, Kakanwil Alex Cosmas Tekankan Integritas dan Profesionalisme



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kabupaten Banjar, Senin (20/10/2025), bertempat di Balai Pertemuan Garuda Kanwil. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem.

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan Nomor W.19-227.AH.02.07.01 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Banjar. Adapun anggota yang dilantik terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan organisasi notaris, yang akan melaksanakan tugas pengawasan terhadap notaris di wilayah Kabupaten Banjar selama masa jabatan tiga tahun.

Dalam sambutannya, Kakanwil Alex Cosmas Pinem menyampaikan bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) memiliki peran strategis dalam menjaga integritas profesi kenotariatan.

“MPD tidak boleh hanya menjadi formalitas, tetapi harus menjadi ujung tombak pengawasan notaris yang paling dekat dengan masyarakat. Setiap anggota harus bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kakanwil juga menekankan pentingnya pengawasan ketat agar praktik kenotariatan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak merugikan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa tantangan dalam bidang kenotariatan semakin kompleks, sehingga setiap laporan atau aduan yang masuk harus ditindaklanjuti dengan prosedur yang tepat untuk menjamin kepastian hukum yang adil.



Selain itu, MPD juga diharapkan lebih responsif dalam melaporkan notaris yang menjelang masa pensiun atau meninggal dunia agar segera dapat ditunjuk pemegang protokol berikutnya, guna mencegah terjadinya kekosongan yang dapat menimbulkan persoalan hukum baru.

Menutup sambutannya, Kakanwil mengucapkan selamat kepada para anggota MPD yang telah dilantik, seraya berharap agar mereka dapat menjalankan amanah dengan profesional, berdedikasi, dan berintegritas tinggi.

“Mari bersama-sama menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia kenotariatan melalui pengawasan yang efektif dan berkeadilan,” pungkasnya.



20 Oktober 2025

Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Rapat Harmonisasi Tiga Ranperbup Hulu Sungai Utara



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Kelompok Kerja Harmonisasi 2 melaksanakan rapat harmonisasi terhadap tiga Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel pada Senin (20/10/2025).

Rapat dipimpin oleh Nizar Al Farisy, Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda Kanwil Kemenkum Kalsel, dengan agenda pembahasan tiga rancangan peraturan, yaitu Ranperbup tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025–2029, Ranperbup tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta Ranperbup tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2025–2029.

Turut hadir dalam kegiatan ini Najeriansyah, Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beserta jajaran Bappeda, Dinas PUPR, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum Setda HSU, serta jajaran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel.

Dalam sambutannya, Najeriansyah menyampaikan bahwa kegiatan harmonisasi ini merupakan langkah penting dalam memastikan kesesuaian tiga rancangan peraturan tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami berharap melalui proses harmonisasi ini, peraturan yang dihasilkan dapat menjadi pedoman kebijakan yang implementatif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara,” ujarnya.

Rapat berjalan dinamis dengan berbagai masukan dan penyempurnaan substansi, baik dari segi konsiderans, ketentuan umum, maupun redaksi teknis. Tim harmonisasi menekankan pentingnya konsistensi penyebutan istilah, kejelasan pengaturan ruang lingkup, serta kesesuaian redaksi dengan kaidah teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Di akhir kegiatan, disepakati bahwa hasil rapat harmonisasi akan dijadikan dasar untuk penyempurnaan substansi sebelum tahapan lebih lanjut. Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung terwujudnya regulasi daerah yang berkualitas, selaras dengan kebijakan nasional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.



20 Oktober 2025

Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan Ikuti FGD Pengumpulan Data Analisis Urgensi Kebijakan Jabatan Fungsional Kekayaan Intelektual



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan rapat koordinasi rutin dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris di wilayah Kalsel. Kegiatan ini digelar di ruang rapat Kanwil Kemenkum Kalsel, Senin (20/10).

Rapat dihadiri Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, dan diikuti oleh para anggota MPW yang terdiri dari unsur Pemerintahan yaitu Kementerian Hukum, serta akademisi, dan organisasi notaris. Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai agenda penting terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan MPW, termasuk evaluasi hasil pemeriksaan berkala terhadap notaris hingga penyusunan jadwal pembinaan.

Kakanwil Kemenkum Kalsel dalam arahannya menyampaikan bahwa MPW berperan penting dalam menjaga profesionalitas dan integritas notaris sebagai pejabat umum.

“Majelis Pengawas Wilayah merupakan garda terdepan dalam memastikan bahwa notaris menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, serta menjunjung tinggi kode etik profesi,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara unsur pemerintah, akademisi, dan organisasi notaris dalam menciptakan sistem pengawasan yang objektif, transparan, dan berkeadilan.

“Kita perlu menjaga keseimbangan antara fungsi pembinaan dan pengawasan agar tujuan utama, yaitu peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat, dapat tercapai,” tambahnya.

Rapat MPW ini diakhiri dengan penetapan tindak lanjut hasil evaluasi serta rencana pembinaan berkelanjutan bagi notaris di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.



21 Oktober 2025

Kemenkum Kalsel dan Pemkab Hulu Sungai Utara Bahas Pembinaan Posbankum Desa/Kelurahan



Amuntai, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, lakukan audiensi dengan Bupati Hulu Sungai Utara, H. Sahrujani, di Kantor Bupati Hulu Sungai Utara. Pertemuan ini digelar dalam rangka pembinaan dan penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan Bupati H. Sahrujani yang menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya Kementerian Hukum memperluas akses layanan bantuan hukum hingga ke tingkat masyarakat paling bawah.

Peserta audiensi juga menyaksikan video singkat mengenai peran dan manfaat Posbankum, yang menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menjelaskan bahwa Posbankum hadir sebagai sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis dan adil.

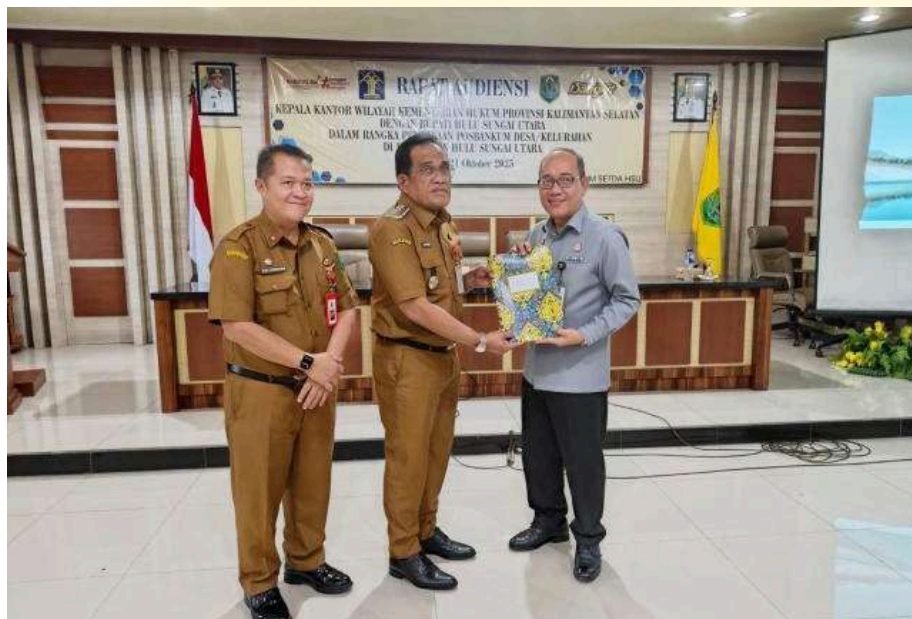
“Posbankum menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Audiensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Kanwil Kemenkum Kalsel dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum.



21 Oktober 2025

Kakanwil Kemenkum Kalsel dan Bupati Hulu Sungai Utara Tandai Penguatan Layanan Hukum dengan Penyerahan STR Posbankum



Amuntai, Humas_Info – Setelah melaksanakan audiensi, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan Surat Tanda Registrasi (STR) Pos Bantuan Hukum (Posbankum) antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, dan Bupati Hulu Sungai Utara, H. Sahrujani.

Penyerahan STR ini menjadi simbol sinergi antara Kemenkum Kalsel dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam memperkuat layanan hukum bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Kakanwil Alex Cosmas Pinem dalam sambutannya menyampaikan bahwa penerbitan STR merupakan bentuk dukungan terhadap lembaga Posbankum agar dapat beroperasi secara legal, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Kami berharap keberadaan Posbankum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan bantuan hukum namun terkendala biaya,” ujarnya.

Melalui momentum ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Hukum semakin memperkuat budaya hukum serta memperluas jangkauan layanan bantuan hukum di Kalimantan Selatan.

21 Oktober 2025

DJKI Sosialisasikan Revisi Pedoman Paten, Kemenkum Kalsel Siap Perkuat Layanan KI



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mengikuti kegiatan Webinar Obrolan Kreatif Edukatif (OKE) KI seri ke-34 bertajuk “Revisi Pedoman Pengumuman Paten untuk Optimalisasi Pelayanan Publik”, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Senin (20/10/2025). Kegiatan ini diikuti oleh ASN dan pegawai bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual dari seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Indonesia.

Webinar ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Rifan Fikri, Kasubdit Permohonan dan Pelayanan Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang DJKI, serta Juldin Bahriansyah, Analis Kebijakan Ahli Madya dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Dalam pemaparannya, Rifan Fikri menyampaikan materi mengenai peningkatan kualitas pelayanan paten, khususnya terkait pemanfaatan informasi, mekanisme pemeriksaan, serta klasifikasi pedoman paten. Ia menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam setiap proses pelayanan kepada masyarakat, mulai dari tahap pemeriksaan hingga pengajuan permohonan paten.

Sementara itu, Juldin Bahriansyah menjelaskan konsep paten sebagai bentuk kontrak sosial yang mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga membahas strategi penyesuaian layanan publik di bidang kekayaan intelektual agar tetap efisien dan mudah diakses oleh masyarakat luas melalui optimalisasi platform digital.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif antara peserta dan narasumber yang berlangsung dinamis. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran pelayanan kekayaan intelektual di Indonesia dapat memahami dan menerapkan revisi pedoman pengumuman paten secara optimal untuk meningkatkan mutu pelayanan publik di bidang kekayaan intelektual.



21 Oktober 2025

Presiden Berpesan: Kasus Pencurian Ayam, Tipiring dan Kasus Kasus Kecil Selesaikan Dengan Bijaksana Tanpa ke Pengadilan. Menkum Siapkan Posbankum di Desa/Kelurahan Sebagai Solusi



Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, hari ini meresmikan 100 persen Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Seluruh Desa dan Kelurahan sebanyak 1.862, di Provinsi Riau. Posbankum adalah wadah bagi masyarakat desa/kelurahan untuk mendapatkan layanan informasi/konsultasi, bantuan hukum non litigasi lainnya/advokasi, penyelesaian sengketa/konflik melalui mediasi oleh Paralegal dan Kepala Desa/Lurah sebagai Juru Damai, dan layanan rujukan advokat baik probono maupun Organisasi Bantuan Hukum.

Terbentuknya 1.862 Posbankum di Riau menggenapi jumlah Posbankum secara nasional yang sudah terbentuk menjadi 47.504 Posbankum Desa/Kelurahan. Dalam kesempatan itu, Menteri Hukum menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto, untuk perkara perkara hukum di masyarakat bawah seperti pencurian ayam, tindak pidana ringan agar diselesaikan dengan bijaksana dan tidak perlu masuk ke Pengadilan yang lama dan mahal.

Hadir dalam peresmian ini, Gubernur Riau, Abdul Wahid dan seluruh Forkopimda Provinsi Riau. Selain itu hadir juga Sherly Tjoanda Laos, Duta Posbankum. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Min Usihen, Sekretaris Jenderal Kemenkum Komjen Pol. Nico Afinta, serta dihadiri oleh Bupati/Walikota dan jajaran di BPHN.

“Saat ini sudah 57% Posbankum hadir di Desa/Kelurahan Se Indonesia atau sekitar 47.504 Posbankum. Saya mengapresiasi dukungan bantuan bapak Gubernur untuk mendorong hadirnya Posbankum di provinsi Riau dengan capaian 100 persen Desa/Kelurahannya ada Posbankum, saya yakin keadilan bisa hadir secepatnya di Riau dan akan menjadi percontohan baik bagi wilayah lainnya,” ungkap Menteri Hukum yang hadir langsung di acara Peresmian Posbankum di Pekanbaru, Riau.

Menteri Hukum juga menekankan bahwa aspek hukum dan keadilan adalah program prioritas yang tertera dalam Asta Cita Presiden Prabowo. Presiden selalu menekankan, hukum adalah jaminan keadilan dan keadilan tidak hanya hak setiap warga negara, keadilan adalah tuntutan setiap warga negara dan negara harus melakukan pemenuhan akses terhadap keadilan.

Menurut Menteri Hukum, pembentukan Posbankum dan pelatihan paralegal adalah langkah konkret Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk mempermudah masyarakat memperoleh akses keadilan hingga ke tingkat desa/kelurahan. Setelah melakukan peresmian Posbankum, Menteri Hukum meninjau Posbankum yang berada di Kota Pekanbaru.

Sementara itu Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum yang telah menjadi inisiator dan mendorong program Posbankum Desa/Kelurahan. “Keberhasilan capaian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Riau dalam pembentukan Posbankum tidak mungkin terwujud tanpa sinergi dengan Kementerian Hukum,” ujar Gubernur Abdul Wahid.

Sementara itu Duta Posbankum, Sherly Tjoanda Laos mengungkapkan, “Kenapa Posbankum penting karena banyak masyarakat di desa tidak tau harus pergi ke mana jika ada masalah hukum, Posbankum dan paralegal bisa memastikan keadilan menjangkau rakyat.” ungkapnya.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyambut baik arahan Presiden Prabowo Subianto dan langkah Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam memperluas pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) hingga tingkat desa dan kelurahan. Menurutnya, pesan Presiden agar perkara-perkara kecil seperti pencurian ayam atau tindak pidana ringan diselesaikan secara bijaksana mencerminkan semangat penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.

Alex menegaskan bahwa Posbankum menjadi instrumen penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal. “Kami di Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan siap mendukung penuh kebijakan nasional ini dengan memperkuat peran paralegal dan memperluas jangkauan Posbankum agar keadilan dapat benar-benar dirasakan hingga pelosok,” ujarnya.



21 Oktober 2025

Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan Ikuti FGD Evaluasi Hukum Terkait Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kesenjangan Gender, serta Peran Perempuan, yang merupakan implementasi Asta Cita ke-4 Presiden Prabowo Subianto. Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual ini diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan difasilitasi oleh Kanwil Kemenkum Jawa Timur.

FGD dibuka oleh Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Timur Haris Sukanto dan Penyuluh Hukum Ahli Utama BPHN Marciana Dominika Jone, dilanjutkan dengan pemaparan hasil analisis oleh Widya Oesman dari BPHN, Amira Paripurna dari Universitas Airlangga, dan Damang Anubowo dari Kejari Surabaya.

Para narasumber menyoroti berbagai persoalan seperti pembebanan biaya visum et repertum kepada korban, stigma sosial, hingga tantangan pembuktian kasus kekerasan berbasis gender dan anak.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum Kalimantan Selatan, Anton Edward Wardhana, menyebut FGD ini menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan hukum yang berpihak pada korban.

“Analisis ini membuka ruang perbaikan baik pada tataran norma maupun implementasi agar perlindungan perempuan dan anak benar-benar efektif,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menegaskan pentingnya pergeseran paradigma hukum menuju keadilan yang memulihkan korban.

“Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak cukup diselesaikan dengan sanksi. Hukum harus menghadirkan perlindungan, pemulihan, dan pencegahan sejak dini,” tutupnya.



22 Oktober 2025

Lewat Banua Bicara TVRI, Kemenkum Kalsel Ajak Publik Dukung Perlindungan Hukum Disabilitas



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan kembali menunjukkan komitmennya terhadap upaya pemajuan hak asasi manusia melalui partisipasi dalam program dialog interaktif Banua Bicara TVRI Kalimantan Selatan, Senin (20/10).

Mengangkat tema “Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas”, kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai unsur, yakni Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Selatan, Karyadi; Analis Hukum Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Yulli Rachmadani; dan Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kalsel, Hervita Liana.

Program Banua Bicara merupakan tayangan rutin TVRI Kalsel yang mengupas isu-isu aktual di masyarakat dengan menghadirkan tokoh pemerintah, praktisi, dan masyarakat sipil. Pada kesempatan kali ini, para narasumber membahas pentingnya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui perlindungan hukum yang menyeluruh dan berkeadilan.

Dalam paparannya, Yulli Rachmadani menjelaskan bahwa terdapat tiga pilar utama dalam perlindungan hukum penyandang disabilitas, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang telah mengakomodasi perlindungan bagi kelompok rentan.

“Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan sinergi lintas pihak — mulai dari masyarakat, organisasi penyandang disabilitas, hingga aparat penegak hukum,” ungkap Yulli.



Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan terus mendorong pemerintah daerah agar dapat membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Disabilitas sebagai payung hukum pelaksanaan pemenuhan hak-hak disabilitas di tingkat daerah.

Kegiatan yang berlangsung di Studio 1 TVRI Kalsel ini juga menjadi sarana edukasi publik mengenai pentingnya kesetaraan dan non-diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Selain itu juga memperkuat kolaborasi antara lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam membangun ekosistem hukum yang inklusif.



22 Oktober 2025

Kolaborasi Antarlembaga Bahas Revisi UU Tipikor, Kemenkum Kalsel Dorong Penegasan Regulasi



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, turut berpartisipasi dalam Focus Group Discussion (FGD) Reformulasi Delik Tindak Pidana Korupsi, Hukum Acara, dan Upaya Pencegahan Korupsi dalam Perubahan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Selasa (21/10).

FGD ini merupakan bagian dari upaya KPK dalam menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun Rekomendasi Kebijakan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kegiatan menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, DR. Nawawi Pamolango, SH., MH., perwakilan dari UNODC Putri Rahayu Wijayanti, Dosen Fakultas Hukum ULM DR. Rudy Indrawan, serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Orin Gusta Andini.

Peserta FGD terdiri atas perwakilan lembaga pemerintah dan aparat penegak hukum di Kalimantan Selatan seperti BPHN melalui Kanwil Kemenkum Kalsel, Pengadilan Tinggi dan Negeri se-Kalsel, Kejaksaan Tinggi dan Negeri, Polda dan Polres, fakultas hukum perguruan tinggi, organisasi bantuan hukum, mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan.

Dalam forum diskusi, Kadiv P3H yang mewakili Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem memberikan pandangan terhadap perlunya kejelasan dalam perumusan definisi kerugian perekonomian negara.



“Perumusan nilai kerugian perekonomian negara harus tegas dan jelas, termasuk lembaga yang berwenang menetapkannya. Selama ini seringkali disebut sebagai potential loss, padahal dalam UU Tipikor dijelaskan bahwa kerugian harus bersifat nyata dan pasti,” ujar Anton.

FGD juga membahas isu penting lainnya, seperti penguatan asset recovery, penerapan beban pembuktian terbalik, perlindungan terhadap saksi dan pelapor, serta reformulasi delik suap sesuai standar internasional (UNCAC dan OECD). Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel berharap hasil diskusi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perubahan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

“Partisipasi aktif dalam forum seperti ini menjadi wujud kontribusi nyata Kemenkum dalam mendukung penguatan sistem hukum nasional yang adil, transparan, dan efektif dalam pemberantasan korupsi,” pungkaskan Anton.



22 Oktober 2025

Dorong Ekonomi Desa, Kemenkum Kalsel Percepat Pendaftaran Merek Kolektif Koperasi Merah Putih



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar Rapat Internal Pembahasan Progres Perkembangan Pendaftaran Merek Kolektif Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih (KDMP), Selasa, 22 Oktober 2025, bertempat di Ruang Rapat BerAKHLAK Kanwil Kemenkum Kalsel.

Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, didampingi oleh Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Dewi Woro Lestari, dan Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Riswandi, serta dihadiri oleh jajaran dari kedua bidang terkait.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan, hambatan, serta strategi percepatan pendaftaran merek kolektif bagi koperasi Merah Putih yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Berdasarkan laporan tim teknis, hingga pertengahan Oktober 2025 telah terdata lebih dari 2.000 koperasi Merah Putih di 13 kabupaten/kota, dengan 128 gerai aktif yang sedang dalam proses penyusunan dokumen pendaftaran merek kolektif.

Dalam rapat, dibahas berbagai kendala administratif dan teknis di lapangan, seperti perubahan kepengurusan koperasi, kelengkapan dokumen akta, serta kurangnya pemahaman tentang mekanisme pendaftaran merek kolektif. Tim juga menyoroti perlunya koordinasi lebih intensif dengan Dinas Koperasi dan instansi daerah guna mempercepat pengumpulan data dan penyerahan berkas permohonan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, dalam arahannya menyampaikan bahwa percepatan pendaftaran merek kolektif merupakan bagian dari program prioritas nasional Kementerian Hukum untuk mendorong kemandirian koperasi desa dan penguatan ekonomi masyarakat berbasis hak kekayaan intelektual.



“Merek kolektif bukan hanya identitas usaha, tetapi simbol kemandirian ekonomi desa. Melalui pendampingan yang terstruktur, kita ingin memastikan seluruh Koperasi Merah Putih di Kalimantan Selatan dapat memiliki perlindungan hukum atas merek mereka,” ujarnya.

Rapat juga menghasilkan beberapa langkah tindak lanjut, di antaranya penyusunan laporan progres terkini per kabupaten/kota, koordinasi lanjutan dengan Dinas Koperasi dan perguruan tinggi mitra, serta monitoring lapangan terhadap koperasi yang telah siap mengajukan permohonan ke DJKI. Selain itu, tim menyepakati strategi peningkatan layanan kekayaan intelektual di Kalimantan Selatan melalui sosialisasi, optimalisasi Sentra KI, dan evaluasi berkala terhadap capaian pendaftaran.

Melalui rapat ini, Kanwil Kemenkum Kalsel menegaskan komitmen untuk terus mendukung percepatan pendaftaran merek kolektif di daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan ekosistem hukum yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.



22 Oktober 2025

Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Reviu Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara Tahun 2024



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Reviu Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara Tahun 2024 dan Persiapan Penyelenggaraan Tahun 2025 melalui Aplikasi SERAYA yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum RI secara daring, Rabu (22/10/2025).

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, Baroto yang hadir mewakili Plt. Inspektur Jenderal. Dalam sambutannya, Baroto menegaskan bahwa pelaporan harta kekayaan merupakan bagian penting dari upaya menjaga integritas dan transparansi aparatur di lingkungan Kementerian Hukum.

Pada kesempatan yang sama, Inspektorat Jenderal juga menyerahkan Piagam Penghargaan Best Achievement Pelaporan Harta Kekayaan melalui Aplikasi SERAYA, yang diraih oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung sebagai peraih terbaik pertama, disusul oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat sebagai terbaik kedua, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai terbaik ketiga.

Dari Kalimantan Selatan, kegiatan ini diikuti secara daring oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, yang hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem, bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka, serta jajaran.

Meidy Firmansyah menyampaikan bahwa pelaporan harta kekayaan aparatur negara merupakan bentuk komitmen terhadap nilai integritas dan akuntabilitas di lingkungan Kementerian Hukum.



“Kami di Kanwil Kemenkum Kalsel berupaya untuk senantiasa menjaga budaya pelaporan yang tertib, transparan, dan tepat waktu melalui Aplikasi SERAYA. Ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari tanggung jawab moral untuk memastikan setiap aparatur bekerja dengan jujur dan berintegritas,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum semakin memperkuat kepatuhan terhadap pelaporan harta kekayaan aparatur negara serta terus mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SERAYA sebagai sarana digital pelaporan yang transparan dan akuntabel.



22 Oktober 2025

HST Capai 100% Pos Bantuan Hukum, Kemenkum Kalsel Dorong Desa Sadar Hukum



Barabai, Humas_Info - Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) kini telah mencapai 100 persen cakupan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dengan total 169 Posbankum yang tersebar di seluruh wilayah, terdiri dari 161 desa dan 8 kelurahan, Rabu (22/10/2025).

Kegiatan peresmian dan penguatan Posbankum ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, serta Bupati Hulu Sungai Tengah, Samsul Rizal. Turut hadir pula unsur Forkopimda, para Kepala Dinas, Asisten, Staf Ahli, Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Kabupaten HST.

Acara diisi dengan pemutaran video tentang Posbankum Kalimantan Selatan, sambutan Kakanwil Kemenkum Kalsel, penyerahan STR dan SK Posbankum, serta sambutan Bupati HST.

Dalam sambutannya, Kakanwil Alex Cosmas Pinem menjelaskan pentingnya memahami ciri negara hukum, di mana seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum serta berhak atas keadilan. Ia juga menekankan peran Pos Bantuan Hukum sebagai sarana nyata dalam mewujudkan akses hukum bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus memperkenalkan peran peacemaker dan paralegal dalam membantu penyelesaian permasalahan hukum di masyarakat.

“Mari bersama kita wujudkan masyarakat dan desa yang sadar hukum serta berkeadilan melalui Pos Bantuan Hukum. Posbankum bukan hanya tempat mencari bantuan hukum, tetapi juga ruang edukasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum di daerah,” ujar Alex.



Sementara itu, Bupati HST Samsul Rizal mengapresiasi dukungan Kemenkum Kalsel dan seluruh pihak dalam terwujudnya 100% Posbankum di wilayahnya.

“Kami berharap Posbankum tidak hanya menjadi tempat masyarakat mencari bantuan hukum, tetapi juga sarana bagi warga untuk memberi saran dan masukan terhadap peraturan daerah, agar kebijakan yang lahir semakin berpihak kepada masyarakat,” ungkapnya.

Dengan tercapainya 100% Posbankum di HST, diharapkan masyarakat semakin mudah memperoleh layanan hukum yang cepat, tepat, dan berkeadilan, serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan desa sadar hukum dan berkeadilan.



22 Oktober 2025

Sosialisasi Pelaksanaan Posbankum Desa/Kelurahan se-Kabupaten HST: Perkuat Akses Bantuan Hukum hingga ke Tingkat Desa



Barabai, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Penyuluh Hukum Ahli Muda Dianor melaksanakan Sosialisasi Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) bagi seluruh desa dan kelurahan se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST). Kegiatan ini berlangsung di Balai Rakyat Barabai, dan diikuti oleh para perwakilan pemerintah desa, kelurahan, serta unsur masyarakat, Rabu (21/10/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Dianor sesuai arahan Kakanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem menjelaskan secara teknis tentang pelaksanaan dan penguatan Posbankum di tingkat desa dan kelurahan. Materi yang disampaikan meliputi aspek regulasi, penganggaran, penyediaan fasilitas, peran paralegal, pendekatan peacemaker, hingga skema operasional Posbankum agar dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Posbankum hadir sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat hingga ke tingkat desa. Melalui dukungan regulasi, anggaran, dan penguatan kapasitas paralegal, Posbankum diharapkan mampu menjadi pusat layanan hukum dan penyelesaian masalah secara damai berbasis masyarakat,” ujar Dianor dalam pemaparannya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat desa/kelurahan dalam memastikan efektivitas pelaksanaan Posbankum. Melalui koordinasi yang baik, setiap Posbankum dapat berfungsi tidak hanya sebagai tempat pemberian bantuan hukum, tetapi juga sebagai wadah edukasi hukum dan penyelesaian sengketa secara musyawarah.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Kanwil Kemenkum Kalsel dalam memperkuat akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya 100% Posbankum di seluruh 169 desa dan kelurahan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dengan terlaksananya sosialisasi ini, diharapkan aparat desa dan kelurahan semakin memahami peran dan tanggung jawab dalam mengelola Posbankum sebagai sarana pelayanan hukum yang mudah diakses, cepat, dan berkeadilan bagi masyarakat.



22 Oktober 2025

Tingkatkan Profesionalisme ASN, Tim SDM Kemenkum Kalsel Ikuti Pembinaan Sistem Merit Nasional

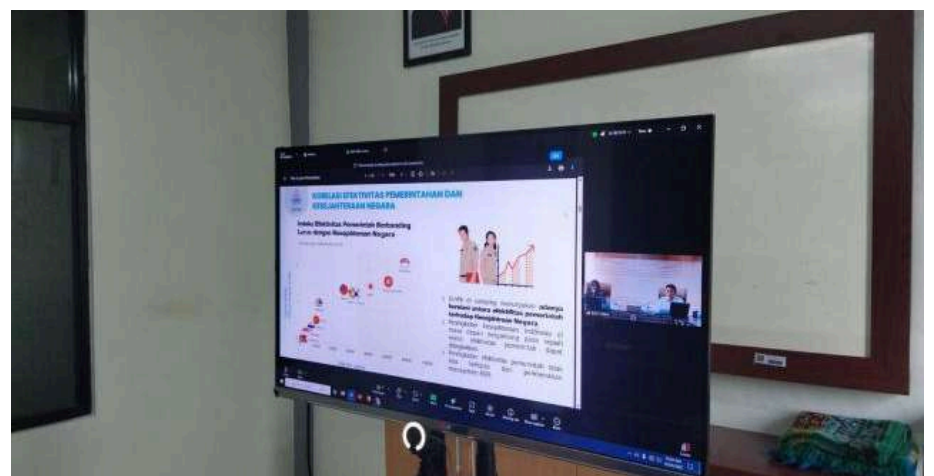


Banjarmasin, Humas_Info – Tim Kerja Pengelola Sumber Daya Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Pembinaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit di Lingkungan Instansi Pemerintah secara daring pada Rabu (22/10/2025).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Deputy Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan implementasi prinsip meritokrasi dalam manajemen ASN di seluruh instansi pemerintah. Melalui kegiatan ini, para peserta memperoleh pembinaan mengenai arah kebijakan terbaru pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024, yang mengalihkan fungsi pengawasan sistem merit dari KASN kepada BKN dan Kementerian PANRB.

Materi pembinaan juga menekankan pentingnya transformasi paradigma pengawasan menjadi pembinaan internal yang proaktif dan berkelanjutan, integrasi data manajemen ASN dalam platform SIASN, serta penguatan kapasitas instansi dalam menerapkan delapan aspek sistem merit. Dengan penerapan yang konsisten, sistem merit diharapkan mampu mewujudkan birokrasi yang profesional, kompeten, dan berintegritas tinggi.

Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola kepegawaian berbasis meritokrasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi pelayanan publik.



23 Oktober 2025

Dari Indonesia untuk Dunia: Usulan Pengelolaan Royalti Global Masuk Agenda Internasional



Jakarta – Proposal Indonesia tentang instrumen hukum internasional pengelolaan royalti resmi masuk dalam agenda pembahasan World Intellectual Property Organization (WIPO). Dokumen dengan kode SCCR/47/6 itu akan dibahas pada Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) ke-47 yang akan digelar di Jenewa, Swiss, pada 1–5 Desember 2025.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan rasa syukur dan optimisme atas diterimanya proposal tersebut untuk dibahas di forum internasional. Pernyataan itu disampaikan pada 21 Oktober 2025 setelah menerima kabar positif terkait keputusan tersebut.

“Alhamdulillah, proposal Indonesia telah resmi masuk dan siap diperjuangkan demi kemaslahatan global. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan tata kelola royalti yang adil, transparan, dan berkelanjutan bagi para pencipta di seluruh dunia,” ujar Supratman di Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2025.

Menurut Supratman, proposal yang dikenal dengan nama The Indonesian Proposal for a Legally Binding Instrument on the Governance of Copyright Royalty in Digital Environment merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian antara Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kebudayaan, serta Kementerian Ekonomi Kreatif. Usulan ini merupakan langkah strategis Indonesia dalam memperjuangkan keadilan ekonomi bagi para pencipta dan pelaku industri kreatif di era digital.

Lebih lanjut, Supratman menekankan bahwa keberhasilan proposal ini sangat bergantung pada dukungan diplomasi multilateral, regional, dan bilateral. Ia mendorong para perwakilan Indonesia di luar negeri untuk memainkan peran aktif dalam memperjuangkan posisi Indonesia di forum WIPO.

“Proposal Indonesia merupakan langkah awal untuk meretas hambatan struktural yang menjadi akar ketimpangan dalam rezim kekayaan intelektual level global yang berisi tiga pilar utama, yakni tata kelola royalti dalam kerangka kerja global WIPO, sistem distribusi royalti berbasis pengguna (user-centric payment system), serta penguatan lembaga manajemen kolektif lintas batas negara. Ketiga pilar ini dirancang untuk mewujudkan ekosistem kekayaan intelektual yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan”, jelasnya.

Dengan langkah ini, menegaskan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang berkomitmen dalam memperjuangkan perlindungan hak cipta serta menjamin para pencipta memperoleh manfaat ekonomi yang layak, serta mendorong tumbuhnya industri kreatif yang berdaya saing dan berkeadilan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, turut menyambut keberhasilan Indonesia membawa usulan pengelolaan royalti ke tingkat internasional melalui forum World Intellectual Property Organization (WIPO). Ia menilai langkah tersebut sebagai tonggak penting dalam memperkuat posisi Indonesia di bidang kekayaan intelektual serta wujud komitmen pemerintah dalam memperjuangkan keadilan bagi para pencipta dan pelaku industri kreatif di era digital. “Masuknya proposal Indonesia dalam agenda pembahasan WIPO menunjukkan bahwa kita mampu berperan aktif dalam membentuk tata kelola royalti global yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan,” ujar Alex di Banjarmasin.

Lebih lanjut, Alex menegaskan bahwa semangat yang diusung melalui The Indonesian Proposal for a Legally Binding Instrument on the Governance of Copyright Royalty in Digital Environment sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menempatkan inovasi dan kreativitas sebagai pilar pembangunan hukum dan ekonomi. “Kami di daerah tentu mendukung langkah ini dengan memperkuat layanan kekayaan intelektual serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak cipta. Upaya global ini harus diimbangi dengan implementasi nyata di tingkat nasional dan daerah,” tegasnya.



23 Oktober 2025

Kemenkum Kalsel Ikuti Arahan Dirjen KI, Dorong Akselerasi Permohonan Hak Cipta dan Desain Industri



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Divisi Pelayanan Hukum mengikuti kegiatan Zoom Meeting yang digelar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia, Rabu (23/10/2025), dengan tema “Motivasi dan Akselerasi Peningkatan Permohonan Hak Cipta dan Desain Industri serta Permohonan Indikasi Geografis Sektor Kerajinan, Perikanan dan Kelautan.”

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu, ini bertujuan untuk mendorong semangat dan sinergi seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam mengoptimalkan capaian kinerja permohonan Kekayaan Intelektual di dua bulan terakhir tahun 2025. Dalam arahnya, Dirjen KI menekankan pentingnya membentuk Tim Percepatan Pencatatan Hak Cipta dan Desain Industri, memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi dan komunitas seni daerah, serta melakukan pelaporan capaian secara berkala.

Dari Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Meidy Firmansyah, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Riswandi, beserta jajaran.

Kadiv Yankum Meidy Firmansyah menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Kalsel siap menindaklanjuti arahan Dirjen KI dengan langkah konkret melalui kegiatan sosialisasi, klinik cepat pencatatan hak cipta, serta memperkuat kolaborasi bersama perguruan tinggi dan komunitas seni di Kalimantan Selatan.

“Kami akan segera menggerakkan jajaran untuk mendukung percepatan permohonan Kekayaan Intelektual sesuai dengan target nasional,” ujarnya.



Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen menjadi bagian dari gerakan nasional percepatan layanan Kekayaan Intelektual, dengan membuka akses lebih luas bagi masyarakat, pelaku UMKM, dan insan kreatif di daerah untuk melindungi hasil karya dan inovasinya.



23 Oktober 2025

DWP Kemenkum Kalsel Gelar Senam Pagi Bersama, Perkuat Kebersamaan dan Kesehatan



Banjarmasin, Humas_Info – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar kegiatan senam pagi bersama di halaman kantor wilayah, Rabu, 23 Oktober 2025.

Kegiatan yang berlangsung penuh semangat ini dihadiri oleh Ketua DWP Kanwil Kemenkum Kalsel, Herlina Alex Cosmas Pinem, bersama Wakil Ketua Puspita Meidy Firmansyah, Desti Anton Edward Wardhana, dan Nenny Rustam Sakka, serta para anggota DWP Kanwil Kemenkum Kalsel.

Senam pagi yang dikemas dalam bentuk Zumba bersama ini menjadi bagian dari agenda rutin DWP dalam rangka menjaga kesehatan jasmani sekaligus mempererat silaturahmi antaranggota. Setelah kegiatan senam, acara dilanjutkan dengan rapat anggota dan arisan rutin yang diisi dengan pembacaan notula rapat sebelumnya, laporan masing-masing bidang, serta arahan dari Ketua DWP.

Dalam sambutannya, Ketua DWP, Herlina Alex Cosmas Pinem, menyampaikan apresiasi atas partisipasi seluruh anggota dan dukungan jajaran Kanwil dalam kegiatan DWP.

“Melalui kegiatan seperti ini, kita tidak hanya menjaga kebugaran tubuh tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan dan kekompakan di lingkungan Dharma Wanita Persatuan Kemenkum Kalsel,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kebersamaan dan dukungan antaranggota menjadi kekuatan utama dalam mendukung tugas-tugas organisasi, terutama dalam mendampingi peran ASN Kemenkum Kalsel untuk terus berkontribusi positif bagi masyarakat.

Suasana penuh keceriaan dan semangat terlihat sepanjang kegiatan. Para peserta mengikuti gerakan senam dengan antusias, mencerminkan komitmen DWP Kanwil Kemenkum Kalsel untuk terus menjaga keseimbangan antara kesehatan, kekeluargaan, dan kinerja organisasi.



23 Oktober 2025

DWP Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Pertemuan Rutin, Perkuat Kebersamaan dan Program Kerja



Banjarmasin, Humas_Info — Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar Pertemuan Rutin sekaligus Rapat Bulanan dan Arisan yang berlangsung dengan penuh kebersamaan dan semangat kekeluargaan, Kamis (23/10/25).

Kegiatan ini dipimpin oleh Ny. Herlina Alex C. Pinem selaku Ketua DWP Kemenkum Kalsel, didampingi Ny. Puspita Meidy Firmansyah selaku Wakil Ketua I, Ny. Desti Anton Edward Wardhana selaku Wakil Ketua II, dan Ny. Nenny Rustam Sakka selaku Wakil Ketua III.

Rangkaian acara diawali dengan senam pagi bersama untuk menjaga kebugaran, dilanjutkan dengan rapat pembahasan program kerja dan laporan kegiatan, kemudian diisi dengan arisan, pembagian doorprize, serta silaturahmi antar anggota yang berlangsung dalam suasana hangat.

Dalam sambutannya, Ketua DWP Kemenkum Kalsel Ny. Herlina Alex C. Pinem menyampaikan bahwa kegiatan rutin ini bukan sekadar ajang berkumpul, tetapi juga sarana mempererat hubungan dan memperkuat komitmen bersama dalam mendukung kinerja organisasi.

“Pertemuan rutin seperti ini menjadi wadah yang baik untuk saling berbagi, mempererat silaturahmi, sekaligus memperkuat sinergi DWP dalam mendukung tugas dan tanggung jawab para suami di lingkungan Kementerian Hukum Kalimantan Selatan,” ujar Ny. Herlina.

Ia juga mengapresiasi keaktifan seluruh anggota dalam menjaga kekompakan dan berharap DWP Kemenkum Kalsel terus menjadi organisasi yang solid, inspiratif, dan berperan nyata dalam kegiatan sosial maupun pemberdayaan perempuan di lingkungan instansi.



23 Oktober 2025

Syukuran Capaian Kinerja, Kemenkum Kalsel Fokus Raih Predikat WBK



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar Syukuran atas Capaian Kinerja sebagai bentuk rasa syukur dan refleksi atas hasil kerja seluruh jajaran selama 100 hari masa tugas Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem, pada Kamis (23/10/25) di Balai Pertemuan Garuda, Kanwil Kemenkum Kalsel.

Kegiatan yang berlangsung hangat dan penuh rasa kekeluargaan ini dihadiri oleh pimpinan tinggi pratama, pejabat struktural, pegawai, Dharma Wanita Persatuan, CPNS, PPNPN, serta mahasiswa magang.

Dalam sambutannya, Kakanwil Alex Cosmas Pinem menekankan bahwa kegiatan syukuran ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum memperkuat semangat kebersamaan dan apresiasi terhadap hasil kerja kolektif seluruh jajaran Kanwil.

“Capaian yang kita raih saat ini adalah hasil kerja bersama. Karena itu, syukuran ini kita maknai sebagai refleksi dan motivasi untuk terus berinovasi dan menjaga semangat kebersamaan,” ujar Alex.

Salah satu capaian yang disorot Kakanwil adalah progres pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di seluruh wilayah Kalimantan Selatan yang telah mencapai hampir 89 persen. Ia juga menyampaikan optimismenya terhadap upaya Kanwil dalam meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun ini.

“Kita sudah berproses panjang dalam kontestasi WBK. Semoga dengan kerja keras dan komitmen bersama, Kanwil Kemenkum Kalsel dapat meraih predikat WBK pada tahun ini,” harapnya.

Alex juga mengingatkan seluruh jajaran agar tetap fokus berkinerja, terus berinovasi, dan menciptakan ide-ide kreatif untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta memperkuat kinerja organisasi.

Acara diakhiri dengan doa bersama dan ramah tamah, di mana seluruh peserta menikmati suasana penuh kebersamaan dan semangat positif. Kegiatan ini berhasil mempererat hubungan antarpegawai serta menumbuhkan motivasi untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kalimantan Selatan.



23 Oktober 2025

Kanwil Kemenkum Kalsel Dampingi Evaluasi IRH dan JDIH, Pemkab Hulu Sungai Selatan Raih Nilai Hampir Sempurna



Loksado, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmen aktif dalam mendampingi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola hukum yang baik. Melalui pendampingan dan sinergi yang intens, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) berhasil meraih nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH) sebesar 99,82 dan nilai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebesar 88 pada tahun 2025.

Capaian ini terungkap dalam kegiatan Evaluasi Penilaian Mandiri IRH dan Hasil Penilaian JDIH yang berlangsung di Pelataran Amandit Loksado, Rabu malam (22/10). Kegiatan dihadiri oleh Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Pemerintah Daerah HSS, serta turut didampingi langsung oleh Tim Kerja Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan.

Dalam sambutan pembukaan, Kepala Bagian Hukum Pemkab HSS, Fitri, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pendampingan yang diberikan Kanwil Kemenkum Kalsel melalui Bidang Hukum. “Sinergi bersama Kanwil sangat membantu kami memahami aspek-aspek teknis penilaian IRH dan pengelolaan JDIH, sehingga peningkatan nilai dapat tercapai secara signifikan,” ujarnya.

Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya BSK Hukum Kementerian Hukum, Endah Kartina, mengapresiasi kolaborasi yang solid antara Pemkab HSS dan Kanwil Kemenkum Kalsel dalam mewujudkan peningkatan IRH yang berkelanjutan.

“Pendampingan dan pembinaan dari Kanwil menjadi faktor penting dalam memastikan kecepatan, ketepatan, serta kesesuaian data dukung di aplikasi penilaian IRH. HSS menjadi contoh baik bagi daerah lain,” ungkap Endah.



Dukungan serupa juga disampaikan Analis Hukum BPHN, Faizal Yusuf, yang menyoroti pentingnya peran Kanwil sebagai jembatan koordinasi dalam pembinaan JDIH di tingkat daerah. Ia menambahkan bahwa aspek keamanan dan pengelolaan meta data perlu terus ditingkatkan agar JDIH semakin adaptif dan modern.

Sebagai puncak kegiatan, Wakil Bupati HSS, Suriani, S.Sos., M.AP., menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, termasuk Kanwil Kemenkum Kalsel yang telah aktif mendampingi dan memfasilitasi pelaksanaan penilaian IRH dan JDIH di daerah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, BSK, dan BPHN atas pendampingan yang berkelanjutan. Semoga sinergi ini terus terjalin untuk mewujudkan reformasi hukum yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ucapnya.

Menanggapi capaian tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan apresiasi dan kebanggaan atas keberhasilan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

“Hasil yang diperoleh HSS menunjukkan bahwa reformasi hukum dapat diwujudkan ketika seluruh unsur bersinergi dengan komitmen kuat. Kanwil Kemenkum Kalsel berperan tidak hanya sebagai pembina, tetapi juga mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan pelaksanaan kebijakan hukum berjalan efektif dan berdampak nyata,” tegas Alex.

Lebih lanjut, Kakanwil menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Kalsel akan terus memperkuat perannya dalam pendampingan, evaluasi, serta pembinaan hukum kepada seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan.

“Kami berkomitmen untuk terus hadir, tidak hanya dalam kegiatan evaluasi, tetapi juga dalam setiap proses pembinaan hukum yang dapat meningkatkan Indeks Reformasi Hukum dan kualitas layanan publik berbasis hukum,” pungkasnya.

23 Oktober 2025

Lindungi Inovasi Lokal, Kemenkum Kalsel Edukasi UMKM Perikanan tentang Hak Kekayaan Intelektual



Banjarbaru, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Tim Pelayanan Kekayaan Intelektual menghadiri kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Produk Perikanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, pada Kamis, 23 Oktober 2025, bertempat di Aula Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan (BPMHP) Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru.

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, pelaku UMKM sektor pengolahan hasil perikanan, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait.



Acara dibuka oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, yang menekankan pentingnya sertifikasi produk bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan kualitas, kepercayaan konsumen, dan daya saing produk perikanan di pasar nasional maupun internasional.

Sebagai narasumber pertama, Kepala BPMHP Provinsi Kalimantan Selatan, Yudita Nurdiana, menjelaskan peran Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dalam memastikan standar mutu produk olahan perikanan. Ia memaparkan tahapan dan prosedur sertifikasi yang harus ditempuh pelaku usaha agar produk mereka dapat memenuhi standar keamanan dan kualitas.



Sementara itu, narasumber dari Kanwil Kemenkum Kalsel, Alvioneda Rennar Putri, Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama, menyampaikan materi tentang pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) bagi produk hasil perikanan. Dalam paparannya, ia menekankan bahwa perlindungan merek, hak cipta, dan paten sangat penting untuk menjaga keaslian produk, mencegah peniruan, serta memperkuat posisi tawar UMKM di pasar global.

“Pendaftaran merek dan hak cipta tidak hanya memberi perlindungan hukum, tetapi juga meningkatkan nilai tambah dan citra produk di mata konsumen,” jelasnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif. Para peserta antusias menanyakan prosedur sertifikasi, biaya pendaftaran merek, serta langkah-langkah memperoleh perlindungan hukum atas produk olahan perikanan mereka.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus mendukung sinergi antar instansi dalam mendorong UMKM sektor perikanan agar memiliki produk yang tersertifikasi dan terlindungi secara hukum, sebagai bagian dari upaya peningkatan daya saing ekonomi daerah.



23 Oktober 2025

Kemenkum Kalsel dan Pemkab Hulu Sungai Selatan Evaluasi Capaian Indeks Reformasi Hukum dan JDIH



HSS, P3H_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) bersama perwakilan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melaksanakan kegiatan Evaluasi Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) dan Hasil Penilaian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Pelataran Amandit, Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), pada Kamis (23/10/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Tim BSK dan BPHN Kementerian Hukum RI, Tim Kerja BSK Kanwil Kemenkum Kalsel, serta perwakilan DPRD, Diskominfo, dan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dalam paparannya, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan hasil capaian IRH yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023 perolehan nilai IRH tercatat sebesar 55,73, meningkat menjadi 98,62 pada tahun 2024, dan mencapai 99,82 pada tahun 2025.

Koordinator Wilayah II Penilaian IRH, Edy Sumarsono, menjelaskan pentingnya menjaga konsistensi dalam pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan daerah dan memastikan setiap dokumen hasil harmonisasi dikelola serta terdokumentasi dengan baik. Ia juga menekankan perlunya keterlibatan pimpinan tinggi dan sekretariat DPRD dalam setiap proses pembentukan produk hukum, mendorong pelaksanaan Diklat Analis Hukum, Perancang Peraturan Perundang-undangan, serta memastikan seluruh data dukung IRH selaras dengan indikator penilaian lainnya agar capaian nilai lebih optimal.

Dalam sesi diskusi, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengemukakan beberapa kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan tenaga ahli IT dalam pengelolaan JDIH, belum tersedianya fitur terjemahan produk hukum, dan tingkat keamanan situs yang masih perlu ditingkatkan. Selain itu, perwakilan dari Sekretariat DPRD menyampaikan bahwa sejumlah Perda inisiatif Dewan belum dilengkapi kajian komprehensif karena sebagian besar masih berangkat dari hasil kunjungan kerja.



Sebagai tindak lanjut, Tim JDIH Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan melakukan peningkatan keamanan dan fitur situs, berkoordinasi dengan tim pusat terkait rencana perubahan website pada tahun 2025, serta menyelaraskan data dukung sesuai indikator IRH. Upaya ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai nilai maksimal dalam penilaian IRH tahun mendatang.

Melalui kegiatan ini, Kemenkum Kalsel menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna mempercepat pelaksanaan reformasi hukum dan penguatan dokumentasi hukum melalui JDIH di wilayah Kalimantan Selatan.





**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**

**#bangga
melayani
bangsa**



Terhubung lebih dekat:  YouTube    [kemenkumkalsel](https://www.kemenkumkalsel.go.id)